

Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur

Pembangunan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat untuk masa depan kemilau





Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur

Pembangunan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat untuk masa depan kemilau

Tim Penulis

(Bapperida Provinsi Nusa Tenggara timur)

Dr. Alfonsus Theodorus, S.T., M.T, Theresia M. Florencia, SE., M.Ec.Dev, Petronela Pakereng, S.E., Weltin Juniati, Yoseph Hironimus Dahat, Desi Lisastris Nenotek, S.Pt, Melchiades Serang, Stanislaus Nay Monny, S.Pd, Terezinha de Carvalho, S.Pt., Abraham Amheka, S.E., Fifi Modok, S.E.

Tim Teknis

(CIFOR-ICRAF Indonesia)

Arga Pandiwijaya, Ira Ratna Sari, Tania Benita, Seruni Fauzia Lestari, Jendri Nenobais, Yeni Frederik Nomeni, Hikmah Fajar Assiddiq, Faza Iza Mahezs, Erlangga, Thifali Adzani, Dewi Bodro, Subekti Rahayu, Cecilia Novia, M. Fikri Fadhillah, Ni'matul Khasanah, Dikdik Permadi, Fitri Marulani, Muhammad Wisnu Haryanto, Suyanto, Feri Johana, Andree Ekadinata, Sonya Dewi

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Pijar Riza Anugerah
Riky Mulya Hilmansyah

Sitasi

Theodorus A, Folorensia TM, Pakereng P, Juniati W, Dahat YH, Nenotek DL, Serang M, Monny SN, de Carvalho T, Amheka A, Modok F, Pandiwijaya A, Sari IR, Benita T, Lestari SF, Nenobais J, Nomeni YF, Assiddiq HF, Mahezs FI, Erlangga, Adzani T, Bodro D, Rahayu S, Novia CY, Fachillah MF, Khasanah N, Permadi D, Marulani F, Haryanto MW, Suyanto, F, Johana , Ekadinata A, Dewi S, Anugerah PR. 2025. *Taklimat Edisi Pertumbuhan Ekonomi Hijau #02 - Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur - Pembangunan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat untuk masa depan kemilau*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa mengubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan. Informasi yang diberikan, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Riky M Hilmansyah

2025

Daftar Isi

- 5 Daftar Singkatan
- 6 Pesan Kunci
- 7 Apa itu Pertumbuhan Ekonomi Hijau?
- 8 Mengapa NTT Butuh Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP)?
- 9 Modal Awal NTT Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- 10 Tantangan NTT Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- 11 Tahapan Proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- 12 Prinsip proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- 13 4 Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur
- 14 Indikator makro Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- 15 6 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- 18 Sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)
- 23 Penutup

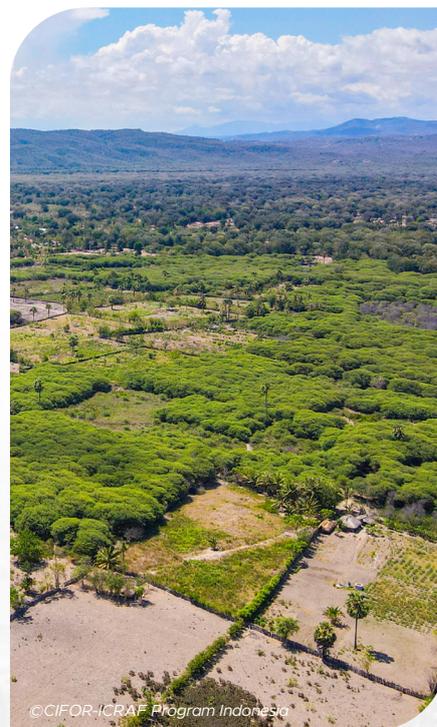
Daftar Singkatan

| | |
|-------------------------|---|
| BAU | <i>Business As Usual</i> |
| CH₄ | Gas Metan |
| CO₂eq | Setara Karbon dioksida |
| DAS | Daerah Aliran Sungai |
| DPSIR | <i>Driver Pressure State Impact Responses</i> |
| GAP | <i>Good Agricultural Practices</i> |
| GEI | <i>Green Economy Index</i> |
| GGF | <i>Green Growth Framework</i> |
| GGP | <i>Green Growth Plan</i> |
| Gapoktan | Gabungan Kelompok Tani |
| GRK | Gas Rumah Kaca |
| HCS | <i>High Carbon Stock</i> |
| HCV | <i>High Conservation Value</i> |
| HD | Hutan Desa |
| HKM | Hutan Kemasyarakatan |
| HPH | Hak Pengusahaan Hutan |
| HPK | Hutan Produksi Konversi |
| HTI | Hutan Tanaman Industri |
| HTR | Hutan Tanaman Rakyat |
| IKK | Indikator Kinerja Kunci |
| IKM | Industri Kecil dan Menengah |
| IKU | Indikator Kinerja Utama |
| KIJLH | Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup |
| KUPS | Kelompok Usaha Perhutanan Sosial |
| LP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| LQ | <i>Location Quotient</i> |

| | |
|------------------|---|
| LUMENS | <i>Land Use Planning for Multiple Environmental Services</i> |
| PBK | Pembayaran Berbasis Kinerja |
| PDRB | Produk Domestik Regional Bruto |
| PIJLH | Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup/Ekosistem |
| RAD GRK | Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |
| REDD+ | <i>Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> |
| RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJPD | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| RTRW | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| SDGs | <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SWOT | <i>Strength Weakness Opportunity Threat</i> |
| TAPE/TAKE | Transfer Anggaran Provinsi/Kabupaten Berbasis Ekologi |
| TKDD | Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
| TPB | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TORA | Tanah Obyek Reforma Agraria |

Pesan Kunci

- Perubahan iklim, daya dukung, dan degradasi lingkungan **merupakan tantangan bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT)**.
- Di hadapan tantangan tersebut, NTT membutuhkan pendekatan dalam pembangunan yang mampu **memastikan ekonomi tumbuh dan lingkungan terjaga: pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*)**.
- Pertumbuhan ekonomi hijau **sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan (RPJPD)** dan mendukung “AYO BANGUN NTT” melalui visi NTT Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan
- Pertumbuhan ekonomi hijau NTT dirancang untuk **menyelaraskan tujuan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan seluruh masyarakat**.
- Dengan perekonomian yang sebagian bergantung pada sektor lahan, NTT **perlu menghindari ekstensifikasi yang berlebihan, dan berganti haluan ke arah peningkatan produksi dan produktivitas, pemrosesan hasil, serta perbaikan rantai nilai yang berkeadilan**.
- Pemodelan menunjukkan bahwa **skenario ekonomi hijau lebih baik dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) dalam menjaga daya dukung lingkungan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi**, dengan berbagai strategi seperti menjaga dan memulihkan tutupan vegetasi, meningkatkan kinerja ekonomi wilayah, mengurangi erosi, meningkatkan keterpaduan habitat, dan meningkatkan ketahanan sosial.



Apa itu Pertumbuhan Ekonomi Hijau?



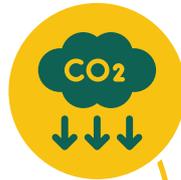
- 1 Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pendekatan **dalam pembangunan yang berusaha menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan seluruh masyarakat** -- termasuk masyarakat rentan dan terutama perempuan dan anak perempuan.
- 2 Konsep pertumbuhan ekonomi hijau **tidak menggantikan “Pembangunan berkelanjutan”** tapi merupakan bentuk konkret dan sistematis dari penerapan pembangunan berkelanjutan.
- 3 Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau *Green Growth Plan* (GGP) Nusa Tenggara Timur **berfokus pada sektor terbarukan berbasis lahan dan turunannya** - pertanian, perkebunan, kehutanan, serta wilayah pesisir dan kelautan - sebagai sumber daya berkelanjutan.

Mengapa NTT Butuh Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP)?



- Dampak perubahan iklim – seperti krisis air, longsor, dan banjir – semakin dirasakan oleh masyarakat NTT.
 - Cuaca ekstrem juga telah memengaruhi produktivitas beberapa komoditas pertanian unggulan NTT, seperti padi, jagung, dan kopi
 - Sektor ekonomi tertinggi di NTT adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi lebih dari seperempat perekonomian wilayah (27,17%). Sektor yang menempati urutan
- keduanya adalah perdagangan (12,62%) sedangkan industri pengolahan masih sangat rendah (1,28%) yang menandakan masih rendahnya tingkat hilirisasi dan pengolahan hasil produksi lokal
 - Menciptakan ketangguhan iklim menjadi tantangan bagi pembangunan di NTT, terutama upaya mengatasi isu-isu strategis yang dituangkan di RPJPD: kemiskinan, stunting, kualitas sumber daya manusia
 - Sebagai provinsi yang pembangunannya banyak ditopang oleh sektor berbasis alam, NTT **perlu pendekatan dalam melakukan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan serta aspek-aspek sosial-ekonomi**. Pendekatan ini **perlu disepakati oleh semua pemangku kepentingan**.
 - Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kapasitas lingkungan untuk menunjang penghidupan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi, meningkatkan risiko bencana serta menyulitkan NTT untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan iklim

Modal Awal **NTT** Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Dasa Cita AYO BANGUN NTT.



Komitmen kerja sama dengan berbagai pihak untuk pembangunan berkelanjutan.



Komoditas unggulan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu sektor perekonomian strategis.



Lokasi strategis untuk pemasaran dan distribusi komoditas pada tingkat regional, nasional, dan global.

Tantangan NTT Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

- Kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta pemangku kepentingan tentang ekonomi hijau dan manfaatnya.
- Minimnya informasi dan edukasi tentang praktik ekonomi hijau yang berkelanjutan.
- Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung program ekonomi hijau.
- Dampak perubahan iklim (seperti meningkatnya cuaca ekstrem, abrasi, banjir dan kekeringan) terhadap produktivitas sektor pertanian dan penghidupan masyarakat berbasis lahan serta pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Tekanan kebutuhan pembangunan terhadap alih fungsi lahan, hutan dan kawasan pesisir dan berbagai ekosistem penting dan unik yang ada di NTT.



- Keterbatasan infrastruktur hijau seperti pengembangan komoditas berkelanjutan, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengolahan limbah.
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk program ekonomi hijau dan kurangnya akses ke sumber pendanaan hijau dari lembaga keuangan.

Tahapan Proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

1

Pemetaan pemangku kepentingan dan *engagement*



2

Menyusun dan meninjau bersama skenario yang ada saat ini atau *Business as Usual* (BAU)



3

Menyusun target pertumbuhan hijau bersama dengan pemangku kepentingan



4

Menyusun strategi pertumbuhan ekonomi hijau dan memodelkan skenario



5

Menerjemahkan strategi/skenario ke rencana pembangunan/ spasial dan peta jalan



Prinsip proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Informed – data dan Informasi

Prinsip *informed* memastikan bahwa dampak *ex-ante* terhadap ekonomi sosial dan lingkungan dibuat berdasarkan pengetahuan yang berasal dari data, informasi, dan pemahaman proses dan fungsi yang kontekstual.

Proses Inklusif

Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dalam membahas, menyampaikan aspirasi, dan merundingkan strategi dan intervensi ekonomi hijau melalui pengetahuan dan konteks lokal.

Integratif – Visi dan Muatan

Menggarisbawahi pentingnya memiliki proses yang bersinergi dan tujuan yang selaras di seluruh konservasi, pembangunan, dan perencanaan tata ruang, serta menghindari *silo*.



Indikator makro Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Dalam dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur, pencapaian tujuan diukur melalui perhitungan indikator makro yang memberikan gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan.

| | | | | | | | |
|---|----|--|----|---|----|---|----|
|  Laju deforestasi | 1 |  Laju perluasan tutupan pohon | 2 |  Laju perluasan agroforestri | 3 |  Emisi GRK (berbasis lahan) | 4 |
|  Emisi (sumber lain) | 5 |  Sekuestrasi GRK | 6 |  Fragmentasi habitat/DIFA | 7 |  Sedimentasi (ketahanan air) | 8 |
|  Aliran permukaan (ketahanan air) | 9 |  Penurunan risiko bencana kebakaran | 10 |  Ketahanan Pangan (Ketersediaan, akses & distribusi) | 11 |  Pendapatan | 12 |
|  Keterkaitan sektor lahan dengan sektor lain | 13 |  Serapan tenaga kerja | 14 |  Rasio Pendapatan Terhadap keuntungan Usaha | 15 |  Rasio Keuntungan usaha tani | 16 |
|  Laju pertumbuhan PDRB | 17 |  Rasio penguasaan lahan oleh masyarakat | 18 |  Intensitas Emisi | 19 | | |

Indikator Ekonomi
 Indikator Sosial
 Indikator Lingkungan

6 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Empat tujuan pertumbuhan ekonomi hijau NTT diterjemahkan kedalam enam strategi yang meliputi berbagai aspek pembangunan, pengelolaan bentang lahan dan penciptaan rantai nilai yang lebih baik. Masing-masing strategi memiliki capaian dambaan yang berpengaruh langsung pada indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau

| Strategi | Capaian Dambaan |
|---|--|
| Strategi 1 Tata ruang dan guna lahan berkelanjutan | 1. Alokasi tata guna lahan yang mengakomodasi pengembangan wilayah dengan pemeliharaan kawasan lindung dan kesesuaian lahan |
| | 2. Alokasi perhutanan sosial melalui pemberdayaan komunitas lokal |
| | 3. Prioritasi area rehabilitasi hutan dan lahan |
| | 4. Penataan kawasan pesisir dengan pengelolaan fungsi ekologis, risiko bencana, dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan |
| | 5. Alokasi area penggembalaan dan peternakan |
| | 6. Alokasi area pengembangan agroforestri bambu |
| | 7. Perluasan terbatas perkebunan kopi |
| Strategi 2 Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima modal penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI | 1. Pengembangan teknologi pertanian cerdas iklim |
| | 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata |
| | 3. Peningkatan akses perizinan dan permodalan UKM dan IKM |
| | 4. Pengembangan energi terbarukan dengan prioritas daerah tertinggal |

| Strategi | Capaian Dambaan |
|--|---|
| <p>Strategi 3 Optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pupuk organik 2. Pengembangan sistem irigasi yang efisien 3. Pelatihan dan pendampingan petani yang menerapkan good agricultural practices (GAP) 4. Peningkatan akses pasar bagi produk pertanian 5. Pengembangan rumah potong hewan dan industri pengolahan terintegrasi 6. Pengembangan industri rumput laut ramah lingkungan 7. Pengembangan praktik pertanian cerdas iklim untuk komoditas jagung |
| <p>Strategi 4 Penguatan <i>supply chain</i> dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem distribusi yang efisien 2. Penerapan sistem pelacakan komoditas untuk manfaat yang adil bagi petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha 3. Peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam rantai nilai dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi gender 4. Pengembangan infrastruktur transportasi 5. Pengembangan infrastruktur maritim 6. Pengembangan teknologi komunikasi (dan konektivitas digital) 7. Optimalisasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus 8. Pengembangan kluster industri dari sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata) 9. Penguatan kelembagaan koperasi, BUMDes, dan UMKM |

| Strategi | Capaian Dambaan |
|---|---|
| <p>Strategi 5 Restorasi daerah aliran sungai, lahan, hutan, pesisir dan sumber daya air</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program restorasi ekosistem di lahan terdegradasi, hutan, dan sumber daya air 2. Penerapan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan dengan agroforestri 3. Penguatan kebijakan konservasi hutan dan sumber daya air 4. Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan |
| <p>Strategi 6 Pendanaan inovatif multipihak melalui mekanisme investasi dan insentif jasa lingkungan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem kompensasi imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), terutama untuk penyediaan air bersih 2. Pemanfaatan imbal jasa lingkungan untuk praktik agroforestri dan pertanian berkelanjutan 3. Pengembangan jalur ekowisata yang terintegrasi 4. Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE dan TAKE) 5. Sertifikasi pertanian dan pengelolaan komoditas unggulan 6. Pembagian manfaat ekonomi karbon |

Sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)

Penyusunan tahapan implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau sejalan dengan penahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Untuk itu, peta jalan rencana pertumbuhan ekonomi hijau sangat erat terkait dengan keberhasilan pembangunan jangka panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Periode I (Tahun 2025-2029)

| Arah Kebijakan RPJPD Terkait dengan Perencanaan Pembangunan | Tahapan pelaksanaan rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;2 Pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi3 Tata kelola; penguatan tata kelola yang tepat fungsi4 Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas sebagai landasan transformasi dan pembangunanMemperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan | <p>Strategi 1 Pengalokasi tata guna lahan yang mengakomodasi pengembangan wilayah dengan pemeliharaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, restorasi/rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan perhutanan sosial, serta perencanaan ruang untuk berbagai fungsi, termasuk pengelolaan wilayah DAS terpadu dan berkelanjutan</p> <p>Strategi 2 Pembangunan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sensitif GEDSI, teknologi pertanian cerdas iklim, peningkatan kapasitas SDM unggul pada sektor kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata</p> <p>Strategi 3 Inisiasi pengembangan praktik pertanian cerdas iklim, peternakan, praktik agroforestri, dan komoditas berbasis pesisir dan laut.</p> |

| Arah Kebijakan RPJPD Terkait dengan Perencanaan Pembangunan | Tahapan pelaksanaan rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 5 Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah 6 Menginisiasi pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan 7 Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki | <p>Strategi 4 Perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan sistem distribusi yang efisien, optimalisasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan <i>Integrated Area Development</i> (IAD) mendukung keterkaitan sumber daya kehutanan dan perhutanan sosial dengan berbagai sektor yang lain, dan inisiasi peningkatan hilirisasi produk komoditas unggulan pertanian dan kehutanan</p> <p>Strategi 5 Penguatan kebijakan konservasi hutan, lahan dan sumber daya air, perencanaan pengelolaan dan restorasi sumber daya air, dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam restorasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan</p> <p>Strategi 6 Inisiasi pengembangan ekowisata yang terintegrasi dengan karakteristik dan potensi lokal, inisiasi pengelolaan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE dan TAKE), penjajakan mekanisme yurisdiksi berkelanjutan dan berbagai sistem sertifikasi pertanian/komoditas unggulan</p> |

Periode II (Tahun 2030-2034)

| Arah Kebijakan RPJPD Terkait dengan Perencanaan Pembangunan | Tahapan pelaksanaan rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 Percepatan pembangunan SDM, berkualitas dan inklusi2 Percepatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis ekonom hijau dan ekonomi biru3 Percepatan tata kelola yang kolaboratif4 Memantapkan supremasi hukum, stabilitas untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan5 Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif6 Mendorong percepatan pembangunan antar wilayah7 Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ramah lingkungan8 Meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi yang dimiliki | <p>Strategi 1 Perluasan terbatas komoditas unggulan perkebunan melalui sistem agroforestri untuk ketahanan pangan dan energi</p> <p>Strategi 2 Pengembangan energi terbarukan berbasis pengelolaan lahan dengan prioritas daerah tertinggal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul pada sektor kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata</p> <p>Strategi 3 Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap, pengembangan budidaya rumput laut ramah lingkungan, dan pengembangan produksi garam</p> <p>Strategi 4 Optimalisasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan IAD yang mendukung keterkaitan sumberdaya kehutanan dan perhutanan sosial dengan berbagai sektor yang lain, dan pengembangan teknologi komunikasi (dan konektivitas digital)</p> <p>Strategi 5 Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan</p> <p>Strategi 6 Inisiasi penerapan sistem kompensasi imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), terutama untuk penyediaan air bersih, pengelolaan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE dan TAKE) mulai di beberapa wilayah, dan pengembangan Pemanfaatan Ekonomi Karbon</p> |

Periode III (Tahun 2035-2039)

| Arah Kebijakan RPJPD Terkait dengan Perencanaan Pembangunan | Tahapan pelaksanaan rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1 Penguatan daya saing SDM yang berkelanjutan2 Penguatan rantai nilai dan rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru3 Perluasan tata kelola yang kompetitif4 NTT yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan damai5 Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan6 Mewujudkan daya saing setiap daerah7 Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan8 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan | <p>Strategi 1 Alokasi dan pelaksanaan restorasi/rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan perhutanan sosial melalui pemberdayaan komunitas lokal, upaya penataan kawasan pesisir dan sempadan sungai dengan pengelolaan fungsi ekologis, risiko bencana, dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan</p> <p>Strategi 2 Pengembangan pasar berbasis digital untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar domestik dan internasional, serta memperkuat sistem pemasaran berbasis komunitas, dukungan riset kesesuaian lahan dan komoditas unggulan dari lembaga riset, perguruan tinggi, organisasi, swasta, dan masyarakat</p> <p>Strategi 3 Pengembangan praktik pertanian padi cerdas iklim agroforestri, dan intensifikasi pengembangan komoditas berkelanjutan</p> <p>Strategi 4 Pengembangan infrastruktur hijau, industri dan infrastruktur pesisir dan laut</p> <p>Strategi 5 Implementasi kebijakan konservasi hutan, lahan dan sumber daya air telah mencapai implementasi yang baik, dan pelaksanaan restorasi sumber daya air secara konsisten.</p> <p>Strategi 6 Pengembangan ekowisata yang terintegrasi dengan karakteristik dan potensi lokal, yang didukung daya saing serta pemanfaatan pembiayaan inovatif dan nilai ekonomi karbon</p> |

Periode IV (Tahun 2040-2045)

| Arah Kebijakan RPJPD Terkait dengan Perencanaan Pembangunan | Tahapan pelaksanaan rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Terwujudnya SDM NTT yang unggul dan sejahtera 2 Terwujudnya NTT sebagai daerah berpendapatan menengah 3 Mewujudkan tata kelola yang adaptif dan berintegritas 4 Mewujudkan NTT yang adil, aman dan damai 5 Mewujudkan pembangunan NTT yang berkelanjutan 6 Mewujudkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan 7 Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang kuat dan berdaya saing 8 Menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah | <p>Strategi 1 Pemantapan alokasi ruang dan pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>Strategi 2 Pengembangan pasar berbasis digital untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar domestik dan internasional, serta memperkuat sistem pemasaran berbasis komunitas</p> <p>Strategi 3 Pengembangan praktik pertanian padi cerdas iklim, GAP telah mencapai tingkat lanjut</p> <p>Strategi 4 Pengembangan kawasan aglomerasi kegiatan berbasis pasar dengan dukungan infrastruktur hijau yang telah memadai</p> <p>Strategi 5 Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan</p> <p>Strategi 6 Pengembangan skema pendanaan, yang didukung adanya <i>sustainability report</i> dari pengelolaan komoditas pertanian dan perkebunan</p> |

Penutup

- Rencana pertumbuhan ekonomi hijau provinsi NTT merupakan salah satu acuan **proses pembangunan terarah** yang memuat visi, *outcome* yang diharapkan, rumusan skenario, strategi yang disepakati, intervensi, dan *ex-ante analysis* yang merupakan gambaran terhadap indikator kinerja di masa yang akan datang.
- Rencana pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan prinsip **inklusivitas, integratif dengan berbagai proses pembangunan** yang sedang berjalan, dan disusun berdasarkan ketersediaan dan analisis data yang dapat menjawab kebutuhan.
- **Rencana pertumbuhan ekonomi hijau selaras dengan visi-misi Gubernur NTT** (Dasa Cita AYO BANGUN NTT) dan **dapat diintegrasikan dengan perencanaan daerah**, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- Langkah implementasi dalam proses pembangunan perlu melibatkan masyarakat, *private sector*, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk dalam pengembangan investasi hijau daerah.



©CIFOR-ICRAF Program Indonesia



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

